

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang dimaksud merupakan hal yang tidak diukur secara ekonomi maupun fisik saja, melainkan menata kehidupan sosial dan kebutuhan spiritual manusia. Kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi dimana manusia secara individu maupun masyarakat dalam konteks kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat.

Konsep yang berkaitan dengan konsep kesejahteraan sosial terdapat dalam beberapa pengertian tentang kesejahteraan sosial. Pengertian kesejahteraan sosial dijelaskan dalam beberapa pengertian yaitu pengertian kesejahteraan sebagai keadaan atau kondisi, pengertian kesejahteraan sosial sebagai usaha dan sebagai institusi dan kesejahteraan sebagai suatu disiplin ilmu akademik.

Konsep kesejahteraan sosial juga membicarakan beberapa konsep yang berkaitan diantaranya terdapat konsep dalam dua pengertian yaitu secara luas dan secara sempit. Didalam pengertian kesejahteraan sosial dan kaitannya dengan konsep terdapat juga hubungannya antara kesejahteraan sosial dengan pekerjaan sosial. Pembahasan konsep kesejahteraan sosial kali ini akan, peneliti akan membahas: pengertian kesejahteraan sosial, keberfungsian sosial, dan pekerjaan sosial.

1.1.1. Pengertian Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial pada dasarnya sudah semestinya dimiliki oleh manusia selama manusia itu hidup bermasyarakat. Kesejahteraan sosial dapat dikatakan

sebagai upaya dalam pencapaian sebuah arti dari kemanusiaan. Merujuk pada pendapat Friedlander yang dikutip dalam Fahrudin (2011: 5) menyatakan bahwa:

Kesejahteraan sosial adalah sistem pelayanan-pelayanan dan institusi-institusi sosial yang terorganisir, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan, serta hubungan-hubungan pribadi dan sosial yang memuaskan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan penuh mereka dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga-keluarga mereka dan masyarakat.

Definisi di atas menggambarkan begitu luasnya konteks kesejahteraan sosial. Tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat merupakan kewajiban dari berbagai institusi sosial yang terorganisir. Semua itu dilakukan dalam rangka proses pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu, kelompok, maupun masyarakat itu sendiri. Hubungan-hubungan sosial pun mesti diperhatikan selama manusia lahir sebagai makhluk sosial. Hubungan-hubungan tersebut tentu akan berperan dalam rangka proses pemenuhan kebutuhan manusia baik yang bersifat individu, kelompok, maupun masyarakat.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang dikutip dalam Fahrudin (2014: 10) bahwa: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya”.

Individu, kelompok, maupun masyarakat harus berada dalam kondisi sejahtera. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Kebutuhan fisik seperti

kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan psikis seperti rasa aman, rasa kasih sayang, dan cinta. Menjalankan fungsi sosialnya meliputi dalam pelaksanaan peran sosialnya sesuai tugas dan kedudukannya dalam sebuah lingkungan masyarakat.

Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan keberfungsian sosial manusia, agar dapat terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya relasi serta adaptasi dengan lingkungan secara baik di masyarakat. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan, yang diakibatkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Friendlander & Apte dikutip dari Fahrudin (2012:12) diantaranya:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
2. Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
3. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)
4. Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
5. Fungsi Pengembangan (*Development*)
6. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
7. Fungsi Penunjang (*Supportive*)
8. Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Fungsi-fungsi tersebut berusaha dicapai untuk mengurangi tekanan dan mencegah munculnya masalah sosial baru. Secara kompleks fungsi-fungsi

kesejahteraan sosial masing-masing fungsinya memiliki fokus tersendiri. Pada fungsi pencegahan ditujukan untuk memperkuat setiap orang untuk terhindar dari masalah baru. Pencegahan tentu sebagai upaya dalam menekan kemungkinan munculnya sebuah masalah sosial.

Fungsi penyembuhan ditujukan untuk pemulihan bagi setiap orang pada masalah kondisi pribadi agar berfungsi kembali. Upaya yang dilakukan, tentu akan focus pada tingkat keberfungsian sosial seseorang. Pada fungsi pengembangan ditujukan untuk memberikan atau membantu pada proses pengembangan sumber daya sosial masyarakat. Pada fungsi penunjang untuk membantu mencapai sektor pelayanan sosial lainnya.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dalam suatu masyarakat dijelaskan dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dikutip Adi (2015:23) bahwa: “Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa setiap individu, kelompok ataupun masyarakat dikatakan tercapainya suatu kondisi yang sejahtera apabila terpenuhinya kategori yang disebutkan dalam Undang-Undang yaitu apabila terpenuhinya kebutuhan material adalah berwujud benda atau material yang dibutuhkan oleh kebutuhan fisik. Selain terpenuhinya material kebutuhan lainnya seperti spiritual yaitu kebutuhan dari dalam diri seperti rasa aman, cinta, kasih sayang, dan kebutuhan beribadah. Sosial dalam arti kebutuhan dimana seseorang

dalam melaksanakan perannya sebagai makhluk sosial dalam masyarakat, seperti dalam aktivitasnya memiliki relasi, berinteraksi dan komunikasi yang terjadi secara timbal balik di lingkungan sosial.

1.1.2. Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial merupakan konsep penting bagi pekerja sosial. Keberfungsian sosial merupakan resultan dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial dimasyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial dan seterusnya. Sebagai contoh, kemampuan melaksanakan peranan sosial adalah kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan status sosialnya. Keberfungsian sosial menurut Barlet dalam Fahrudin (2014: 62) sebagai berikut: “Keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demands*) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan”.

Proses pertolongan peranan pekerjaan sosial sangat beragam tergantung pada konteksnya. Secara umum pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana, dan pemecah masalah. Kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan peningkatan keberfungsian sosial seseorang atau kelompok maupun masyarakat dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut (Dubois dan Miley) dalam Suharto (2007: 5):

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.

3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berpr kemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Menurut Fahrudin (2014: 71) mengatakan bahwa secara tradisional pekerjaan sosial mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu, yaitu: “(1) Metode Pokok: *Social case work*, *Social group work*, dan *Community Organization/Community Development*. (2) Metode Pembantu: *Social work administration*, *Social action*, dan *Social work research*”.

Keluarga, organisasi sosial, dan masyarakat dapat dikatakan berfungsi secara sosial, apabila mereka mampu menjalankan peranan-peranan sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma sosialnya. Tidak terlepas juga pemuda sebagai unsur dari masyarakat juga harus dapat berfungsi secara sosialnya. Pemuda harus mengetahui seperti apa peranan dalam masyarakat khususnya untuk memupuk kualitas diri agar dapat bersaing, salah satunya melalui Karang Taruna.

1.1.3. Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya dalam upaya meningkatkan tingkat keberfungsian sosial dan mencapai derajat sejahtera. Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi dimana dalam pelaksanaannya mencoba untuk mengembalikan keberfungsian sosial seseorang melalui berbagai pendekatan. Pekerjaan sosial adalah profesi kemanusiaan yang

mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan dan aspirasi masyarakat. Pekerjaan sosial menurut Zastrow dikutip Suharto (2011:32) adalah:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi tersebut menyatakan bahwa praktik pekerjaan sosial yang dilakukan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ahli pekerja sosial maka disebut sebagai aktivitas professional. Tujuannya dari pekerjaan sosial adalah fokus pada keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat agar terciptanya suatu kondisi yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud tentu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat menampilkan peran sosialnya sebagaimana mestinya.

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang tentunya merujuk kepada ilmu-ilmu yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi yang merujuk pada ahli di atas menunjukkan bahwa pekerjaan sosial sebagai wujud pertolongan baik kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan secara professional guna menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif serta mengembalikan keberfungsian sosial seseorang.

Tujuan utama dari pekerjaan sosial yang melakukan praktik pekerjaan sosial adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial. Ketika mereka berfungsi sosialnya, maka mereka bisa melakukan sesuatu hal untuk mengupayakan kehidupan dengan memenuhi kebutuhan dan mencapai derajat kehidupan yang lebih baik.

Proses tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang digunakan pekerja sosial pada dasarnya adalah, untuk meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) klien yang dibantunya baik individu, kelompok, maupun masyarakat atau komunitas yang sedang mengalami permasalahan.

Keberfungsian sosial menurut Skidmore, Thackeray dan Farley dalam dari Suharto (2009: 5) adalah: “Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial. Ia merupakan pembeda antara pekerjaan sosial dan profesi lainnya”. Pekerjaan sosial berusaha untuk mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok ataupun masyarakat. Setiap orang memiliki peranan sosial yang menjadi kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status perannya.

Barlett dalam Fahrudin (2012:62) menyatakan bahwa: “Keberfungsian sosial merupakan fokus utama pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demands*) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan”. Artinya seseorang dikatakan berfungsi sosialnya apabila dapat mengatasi dan menjalankan tuntutan sesuai peran sosialnya di lingkungannya yang merupakan sebagai bagian tugas-tugas kehidupannya.

Siporin dalam fahrudin (2012:62) menyatakan bahwa: “Keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas-seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya-berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa seseorang dikatakan berfungsi sosialnya jika

ia mampu memenuhi kebutuhan dan menjalankan kehidupan sesuai peran sosialnya di lingkungan sesuai tuntutan peranannya.

Peranan sosial dimiliki oleh setiap individu dalam mempertahankan kehidupannya, maka setiap orang akan berusaha mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-caranya serta menjalankan tugas-tugas kehidupan agar terpenuhinya kehidupan yang sejahtera. Fahrudin (2012:63) menyatakan bahwa:

Keberfungsian sosial menunjukkan keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan, dan penyesuaian timbal balik antara orang, secara individual atau secara kolektif, dan lingkungan mereka. Keberfungsian sosial dinilai berdasarkan apakah keberfungsian sosial tersebut memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada orang dan komunitasnya, dan apakah keberfungsian sosial itu normal dan dibenarkan secara sosial.

Hal tersebut menjelaskan bahwa tercapainya dan terpenuhi keberfungsian sosial seseorang akan mencapai titik keseimbangan hidup dengan terpenuhinya segala kebutuhan dan tuntutan hidup. Selain itu tidak hanya terpenuhinya kebutuhan, tetapi juga peranan sosialnya berjalan sesuai dengan tuntutan peran sosialnya di lingkungan masyarakat. Peranan di lingkungan sosial dengan kebutuhan saling terkait, karena relasi dengan individu, kelompok ataupun di masyarakat menjadi suatu kebutuhan dalam status sosial seseorang dalam hubungan timbal balik. Adanya relasi diantara orang yang saling mempengaruhi akan membantu memenuhi tuntutan dalam peranan sosial.

Fokus pekerjaan sosial adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial, maka merujuk pada praktik pekerjaan sosial memiliki tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW yang dikutip Fahrudin (2012: 66) adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa profesi pekerjaan sosial berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok ataupun masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan kemampuan, mengatasi masalah hingga menghubungkan kepada sistem sumber dan pelayanan-pelayanan sosial, dan memperbaiki kebijakan sosial yang ada.

Pekerja sosial dalam menjalankan peran-perannya merupakan cara yang dilakukan untuk menggunakan kemampuannya dengan status kedudukannya sebagai pekerja sosial profesional. Keberadaan profesi pekerjaan sosial dititikberatkan pada tindakan nyata (*a profession is dedicated to action and doing*) Pekerja sosial menurut pakar profesi pekerjaan sosial Soetarso dalam Huraerah (2008: 39) adalah:

Pekerja sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal-balik yang saling menguntungkan antara orang dan lingkungan sosialnya (perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat) untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai suatu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pekerja sosial merupakan profesi yang dilaksanakan pada pemberian bantuan disertai adanya hubungan antar manusia dan adanya timbal balik. Sehingga dapat mengembangkan kemampuan personal untuk memperbaiki kualitas kehidupan yang sejahtera. Berdasarkan definisi di atas terdapat kesimpulan menurut Soetarso dalam Huraerah (2008:39) diantaranya:

Dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan pekerjaan sosial adalah:

- a. Berlandaskan prinsip dan metode ilmu pengetahuan
- b. Berinti pemberian bantuan
- c. Menggunakan hubungan antar manusia sebagai alat
- d. Ditujukan untuk pengembangan personal dan sosial sebagai satu kesatuan
- e. Mencakup juga pengembangan kualitas lingkungan sosial dan fisik (lingkungan hidup)

Profesi pekerja sosial tentunya dalam menjalankan praktiknya memiliki metode dan teknik pekerjaan sosial. Pekerja sosial secara tradisional memiliki tiga metode pokok dan tiga metode pembantu, Fahrudin (2012:71) menyatakan bahwa: “Metode pokok tersebut adalah *social case work*, *social group work* dan *community organization/community development*. Metode pembantunya adalah *social work administration*, *social action*, dan *social work research*”.

1.1.4. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu pekerjaan yang menjadi suatu kewajiban dalam tuntutan pekerjaan yang dilakukan secara sistematis sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan mewujudkan kembalinya keberfungsian sosial setiap individu. Sehingga tercapainya tujuan setiap orang dan terciptanya kondisi yang sejahtera. Pelayanan-pelayanan sosial secara luas menurut Sainsbury meliputi kesehatan, pendidikan, pemeliharaan penghasilan, perumahan dan pelayanan sosial personal. Pengertian pelayanan sosial menurut Sainsbury dikutip Fahrudin (2012: 50) menyatakan bahwa:

Pelayanan-pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal services*) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu khususnya, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atas tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pelayanan-pelayanan sosial berlaku untuk semua orang dan dilihat secara luas aspek pelayanan yang diperlukan. Tujuannya dari pelayanan sosial agar tercapainya seluruh kebutuhan-kebutuhan setiap orang dan mengurangi serta mengatasi masalah-masalah sosial setiap orang, agar perannya dimasyarakat dapat diterima dan berfungsi kembali. Merujuk pada peran individu pelayanan sosial memiliki pelayanan khusus kepada personal, maka terdapat definisi pelayanan sosial dalam arti sempit menurut Romanyshyn yang dikutip Fahrudin (2012: 51) pelayanan sosial adalah:

Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian individu-individu dan keluarga-keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung, dan (2) proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pelayanan sosial yang mencakup ruang lingkup yang sempit termasuk dalam kategori pelayanan yang merujuk pada individu dan keluarga. Untuk membantu meningkatkan kemampuan individu dan keluarga supaya tercapai kondisi sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan, melalui penguatan diri dan kemampuan dalam menghadapi segala tuntutan perubahan hidup di lingkungan bermasyarakat.

Pada intinya pelayanan sosial memiliki konsep dengan dua pengertian dalam arti luas dan arti sempit. Idealnya, pelayanan-pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, pelatihan kerja, dan pelayanan sosial personal (semuanya mencakup sebagai pelayanan sosial dalam arti luas) disediakan pada tingkat minimal untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian orang-orang. Pelayanan sosial dibutuhkan oleh setiap masyarakat

dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan. Pelayanan sosial harus dilakukan dengan sebaik mungkin.

1.2.Konsep Modal Sosial

Modal sosial menyoroti tentang hubungan individu dengan sesama yang mana hubungan tersebut dibangun oleh individu maupun kelompok agar dapat berperan dalam sebuah lingkungan. Implementasi dari modal sosial dapat terlihat dari kualitas individu yang secara sosial lebih peka terhadap lingkungan masyarakat. Proses yang dibangun dalam modal sosial, tentu harus memiliki sebuah komitmen yang mana dapat mempersatukan individu dengan individu lainnya.

Menurut Field (2011: 1) menyatakan bahwa:

Orang membangun hubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut sejauh jaringan tersebut menjadi sumber daya, dia dapat dipandang sebagai modal.

Pernyataan di atas tentu dapat menjelaskan bagaimana modal sosial terbentuk. Penyelenggaraan modal sosial sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial yang dibangun. Jaringan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah modal dalam menjali hubungan baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.

Definisi lain dari modal sosial berasal dari Putnam yang dikutip dalam Field (2011: 51) mengatakan bahwa: “modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama”. Artinya, begitu pentingnya modal sosial sebagai pendorong untuk pengembangan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM) terlihat dari proses pencapaian tujuan bersama secara

lebih efektif yang didorong oleh modal sosial yang terbagi menjadi jaringan kerja, norma sosial, dan kepercayaan.

Dari pendapat kedua ahli di atas, baik Field maupun Putnam dapat ditarik benang merah bahwa modal sosial merupakan, sebuah kekayaan yang sebenarnya mesti dimiliki oleh manusia agar sebuah jaringan kerja dapat terbentuk yang dilandasi oleh norma dan saling menjaga kepercayaan untuk mencapai sebuah tujuan bersama.

Penjelasan tersebut menunjukkan adanya komponen yang dapat membangun modal sosial yaitu jaringan kerja, norma sosial, dan kepercayaan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih terperinci terkait komponen dari modal sosial. Modal sosial berusaha untuk membangun dan menjaga jaringan sebagaimana manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang tentunya mesti berlandaskan norma dan kepercayaan agar pengembangan kapasitas dari individu dapat berlangsung lebih optimal serta efisien.

Pemuda merupakan aset bangsa yang mesti dibina agar kualitasnya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan masyarakat. Proses pembinaan generasi muda dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui organisasi Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna merupakan sebuah wadah bagi pemuda dimana pemuda dapat melaksanakan aktualisasi dirinya, lebih jauh lagi pemuda dapat turut serta dalam upaya pengembangan masyarakat. Organisasi Karang Taruna merupakan wadah sebagai generasi muda agar dapat menyalurkan sebuah gagasan serta inovasi yang dapat menjadi sebuah peluang untuk pembinaan generasi muda. Geresai muda yang telah dibina melalui

organisasi, salah satunya Karang Taruna tentu dapat meningkatkan kualitas dari individu yang melaksanakannya.

Tabel 2.1. Tipe Modal Sosial Hasbullah

BONDING SOCIAL CAPITAL	BRIDGING SOCIAL CAPITAL
Terikat, jaringan yang eksklusif	Terbuka
Pembedaan yang kuat antara “orang kami” dan “orang luar”	Memiliki jaringan yang lebih fleksibel
Hanya ada satu alternatif jawaban	Toleran
Sulit menerima arus perubahan	Memungkinkan untuk memiliki banyak alternatif jawaban dan penyelesaian masalah
Kurang akomodatif terhadap pihak luar	Akomodatif untuk menerima perubahan
Mengutamakan kepentingan kelompok/solidaritas kelompok	Cenderung memiliki sikap <i>altruistic, humanitarianstik</i>

Sumber: Hasbullah dalam Taqiyudin Subki (2011)

Tabel 1.3. menjelaskan bahwa modal sosial memiliki 2 jenis yaitu “*Bonding Social Capital*” dan “*Brindging Social Capital*”. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Dari table diatas, dapat diketahui bagaimana karakteristik modal sosial dari pemuda dalam Karang Taruna sehingga dapat dikategorikan sesuai dengan karakteristiknya. Pola pertama lebih mengarah ke *Inward Looking*, hanya melihat ke dalam saja. Sedangkan, pola yang kedua merujuk pada pola *Outward Looking*, melihat kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Modal sosial kali ini, akan terfokus pada pemuda yang terlibat dalam Karang Taruna dan berperan aktif dalam upaya pengembangan dibidang ekonomi

melalui pengelolaan bank sampah. Selain turut andil dalam bidang ekonomi yang berdampak pada penekanan angka pengangguran di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, pengelolaan bank sampah berupaya untuk memanfaatkan limbah yang dapat didaur ulang agar dapat bernilai ekonomi.

Tanpa adanya modal sosial, upaya dalam pengelolaan bank sampah akan sulit terlaksana mengingat pengelolaan bank sampah memerlukan jejaring yang kuat serta norma dan kepercayaan mesti dibangun. Modal sosial sangatlah penting bagi pemuda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna terutama dalam implementasinya di lingkungan masyarakat.

Penyelenggaraan organisasi Karang Taruna tentulah memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Penelitian kali ini merujuk pada konsep modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (2011:51) bahwa modal sosial terdiri dari 3 unsur pokok yaitu norma sosial, kepercayaan, dan jaringan kerja.

1.2.1. Jaringan (*Networks*)

Jaringan sosial merupakan salah satu unsur dari modal sosial, dimana jaringan sosial digunakan sebagai sumber daya untuk mendapatkan sesuatu dalam lingkungan sosialnya. Jaringan memiliki peran penting dalam modal sosial yang dimiliki seseorang seperti pendapat Bourdieu dalam Field (2011: 26) yang menyatakan: “modal sosial merepresentasikan agregat sumber daya aktual atau potensial yang dikaitkan dengan kepemilikan jaringan yang bertahan lama”. Dengan demikian, jaringan kerja merupakan hal yang penting dalam modal sosial seseorang untuk mengoptimalkan proses interaksi dalam sebuah lingkungannya.

Merujuk pada pendapat Field (2011: 18) mengenai jaringan, menyatakan bahwa: “Jaringan memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik”. Artinya jaringan dibentuk tentu untuk mendapatkan sebuah keuntungan melalui kerjasama yang dapat dimaksimalkan sehingga akan memperoleh manfaat yang sifatnya menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Jaringan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah penghubung dalam melaksanakan sebuah tindakan. Jaringan sosial menjadi sangat penting ketika berbicara mengenai modal sosial dari pemuda yang mana tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda merupakan elemen penting dari masyarakat. Pendapat lain mengenai jaringan sosial Agusyanto dalam bukunya (2007: 13) menyatakan bahwa:

Jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, di mana ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam jaringan adalah hubungan sosial. Berpijak pada jenis ikatan ini, maka secara langsung atau tidak langsung yang menjadi anggota suatu jaringan sosial adalah manusia (*person*)

Definisi di atas menjelaskan bahwa jaringan sosial merupakan sebuah ikatan yang dibentuk untuk menghubungkan sebuah tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut dapat terhubung melalui sebuah jaringan dalam sebuah hubungan sosial di dalamnya. Hubungan sosial yang dimaksud tentu secara langsung maupun tidak langsung menjadikan manusia menjadi anggotanya dalam sebuah jaringan sosial.

Menurut Damsar (2009: 160) mengenai fungsi dari jaringan yaitu:

Fungsi jaringan memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai pelicin, dimana jaringan memberikan berbagai kemudahan dalam mengakses berbagai macam kebutuhan maupun sumberdaya yang diperlukan di dalam suatu industri seperti informasi. Jaringan menjadi jembatan manakala di dalam

bekerjasama adanya norma yang menagtu setiap orang yang terlibat di dalam kerjasama itu mengikuti aturan sehingga terjadinya rasa kepercayaan di antara orang yang terlibat. Sebagai perekat, jaringan berfungsi memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial.

Jaringan yang terbentuk tentu akan mempermudah dalam mengakses berbagai kebutuhan sesuai dengan pendapat di atas. Sumber daya yang diperlukan akan lebih mudah didapatkan sehingga rasa kepercayaan akan tumbuh diantara orang-orang yang terlibat. Jaringan yang dibangun akan membentuk sebuah tatanan pada kehidupan masyarakat.

1.2.2. Norma (*Norms*)

Pengertian norma yaitu memberi pegangan untuk seorang manusia dalam berperan dalam masyarakat atau dapat dikatakan sebagai pedoman yang mengatur tingkahlaku manusia dalam melaksanakan fungsinya dalam masyarakat. Merujuk pada pendapat Soejono Soekanto (2010: 174) menyatakan ada 4 pengertian yang disusun sesuai dengan kekuatannya dari yang terlemah hingga yang terkuat yaitu: “Cara (*Usage*), kebiasaan (*Folkways*), tata kelakuan (*Mores*), dan adat istiadat (*Custom*)”.

Ditinjau dari definisi di atas, dapat dikatan bahwa norma sosial adalah sebuah seperangkat aturan yang jika dilanggar oleh seseorang dalam masyarakat maka akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Norma sosial juga sangatlah penting bagi pemuda yang tergabung dalam sebuah organisasi atau komunitas. Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang jika didalamnya tidak terkandung norma sosial, maka akan menimbulkan permasalahan seperti yang diutarakan oleh Fukuyama (2005:17) bahwa:

Masalah yang akan timbul dari tidak adanya norma, masalah pertama berkaitan dengan kenyataan bahwa nilai-nilai moral dan aturan sosial bukanlah semata-mata kekangan sewenang-wenang atas pilihan individu; sebaliknya itulah prasyarat dari berbagai kerjasama. Masalah yang kedua adalah akan berakhirnya komunitas jika aturan atau norma sosial itu tidak ada.

Merujuk pada definisi di atas, dapat dikatakan bahwa norma merupakan sebuah hal yang mesti disepakati bersama dalam hal ini organisasi Karang Taruna sebagai wadahnya. Wujud dari norma sosial juga bukanlah kesewenang-wenangan begitu saja tanpa adanya komunikasi dalam sebuah kelompok. Jika organisasi Karang Taruna tidak memiliki norma sosial, maka organisasi tersebut tentu tidak akan mampu bertahan dan melaksanakan peran fungsinya.

Organisasi Karang Taruna, tentu harus memiliki norma sosial yang disepakati dan dijaga oleh seluruh pengurus yang ada. Pemuda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna akan bermusyawarah untuk menyepakati norma yang menjadi sebuah aturan. Organisasi Karang Taruna, sebagai wadah berkembang bagi kenerasi muda harus dapat berperan aktif.

Hal demikian dilakukan agar pengelolaan bank sampah dalam upaya peningkatan kualitas ekonomi serta berperan aktif di lingkungan masyarakat melalui pemanfaatan sampah yang dapat membantu pengurangan jumlah sampah di masyarakat. Demikianlah seberapa besar peran norma sosial dalam membangun jaringan sosial dan dalam modal sosial.

1.2.3. Kepercayaan (*Trust*)

Modal sosial erat kaitannya dengan kepercayaan agar segala tingkah laku yang dilakukan oleh manusia dalam proses bermasyarakat. Kepercayaan memiliki

peranan penting dalam pemanfaatan modal sosial seiring dengan perkembangan zaman. Francis Fukuyama merupakan salah satu tokoh penting yang mengangkat hal-hal yang bersifat substansial dari modal sosial. Merujuk pada Fukuyama (2007: 36) ia berpendapat bahwa:

Trust, dengan demikian, adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota lain dari komunitas itu.

Pandangan dari Fukuyama di atas, menunjukkan bahwa dalam sebuah komunitas/kelompok semua sepakat bahwa sebuah pengharapan akan muncul dengan proses sesuai dengan fokus dari komunitas tersebut. Kaitannya dengan pemuda jelas terlihat dari cara pemuda melakukan aktualisasi dirinya pada organisasi Karang Taruna.

Organisasi karang taruna, jelas mengharapkan bahwa pemuda yang tergabung dapat menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat melalui pemanfaatan modal sosial dalam pengelolaan bank sampah salah satunya. Kepercayaan sangatlah diperlukan agar sebuah upaya peningkatan ekonomi dapat terlaksana dengan baik. Fukuyama (2007: 38) mengatakan bahwa:

Social Capital memiliki konsekuensi-konsekuensi utama bagi penentuan hakikat ekonomi industri yang akan bisa diciptakan oleh masyarakat. Jika orang-orang yang bekerja bersama dalam sebuah perusahaan saling mempercayai dan bekerja menurut serangkaian norma-norma etis bersama, maka berbisnis hanya memerlukan sedikit biaya. Masyarakat demikian akan lebih mampu berinovasi secara organisasional, karena tingkat kepercayaan yang tinggi akan memungkinkan munculnya varietas hubungan sosial yang lebih luas.

Pandangan demikian merupakan gambaran bagaimana saat ini manusia hidup dengan kepercayaan yang relatif rendah. Kepercayaan dapat menunjang

aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat saat ini mesti diupayakan agar dapat mencapai sebuah kondisi dimana masyarakat dapat melaksanakan peran dan fungsinya. Upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui peningkatan rasa percaya antar individu, individu dengan kelompok, maupun dalam sebuah ruang lingkup masyarakat, dengan demikian usaha kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan baik.

1.3. Konsep Bank Sampah

Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung (menyerahkan sampah) juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan serta dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang, kemudian akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama dengan bank sampah.

Bank sampah mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengolah sampah secara bijak agar dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Selain itu warga yang menyerahkan sampah akan memperoleh tambahan penghasilan untuk kemandirian ekonomi warga dapat digunakan untuk usaha simpan pinjam agar keuangan bank sampah dapat diputar dan dikembangkan, juga terwujudnya kesehatan lingkungan.

Pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat dapat melakukan inisiasi dalam pelaksanaan bank sampah ini. Melalui Karang Taruna, pemuda tentu dapat memobilisasi aktivitas pengelolaan bank sampah ini bersama dengan masyarakat.

Selain sebagai salah satu upaya dalam pengentasan masalah lingkungan, pengelolaan bank sampah juga dapat mendorong nilai ekonomi para pemuda sebagai pengelola dan masyarakat. Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan No. 13 Tahun 2012 menyatakan bahwa: “Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.” (Negara, Hidup, & Indonesia, 2012)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bank sampah merupakan salah satu solusi dalam pengentasan permasalahan lingkungan atau sampah yang memiliki nilai ekonomi. Pemilahan sampah akan menjadi salah satu aktivitas yang mana sampah akan dipilah sesuai dengan kategorisasi sesuai dengan kebutuhannya. Aktivitas pengumpulan sampah bermaksud untuk mengumpulkan sampah yang tersebar di berbagai titik. Sampah tersebut nantinya akan didaur ulang dan diguna ulang agar memiliki nilai ekonomi untuk menunjang keuangan pengelola.

1.3.1. Perkembangan Bank Sampah di Indonesia

Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul – angkut – buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah

atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

Namun kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui pengembangan Bank Sampah yang merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA.

Pembangunan bank sampah ini harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah, karena sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik, sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia. Kaitannya tentu dengan Organisasi Karang Taruna yang harus menjadi wadah untuk pembinaan generasi muda agar dapat mengembangkan kreativitas dan bakat-bakat yang dimiliki oleh pemuda. Mengingat pemuda sebagai elemen masyarakat yang cenderung memiliki berbagai gagasan dan inovasi dalam proses pengembangan wilayah.

Statistik perkembangan pembangunan Bank Sampah di Indonesia pada bulan Februari 2012 adalah 471 buah jumlah Bank Sampah yang sudah berjalan dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp. 1.648.320.000 perbulan. Angka statistik ini meningkat menjadi 886 buah Bank Sampah berjalan sesuai data bulan Mei 2012, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan

jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp. 3.182.281.000 perbulan. (www.menlh.go.id)

1.3.2. Mekanisme Kerja Bank Sampah

Pengelolaan bank sampah, tentu sudah semestinya mengacu pada mekanisme kerja agar pengelolaan bank sampah dapat terstruktur sedemikian rupa. Proses pengelolaan bank sampah berawal dari sampah yang terdapat di masyarakat, kemudian dipilah, dan ditampung di bank sampah untuk di proses sesuai dengan prosedur yang ada. Masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang mekanisme kerja bank sampah mengatakan bahwa mekanisme kerja bank sampah meliputi:

1. Pemilahan sampah;
2. Penyerahan sampah ke bank sampah;
3. Penimbangan sampah;
4. Pencatatan;
5. Hasil penyerahan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan;
6. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pengelola.

Mekanisme kerja bank sampah merupakan standar awal terbentuknya sistem tata kelola bank sampah yang harus dilaksanakan baik oleh pengelola maupun masyarakat yang menabung. Bank sampah yang sudah terbentuk, dapat berpedoman pada mekanisme kerja bank sampah sesuai dengan Permen LH No. 13 tahun 2012 tentang mekanisme kerja bank sampah tersebut. Semua itu untuk memastikan pengelolaan bank sampah sudah sesuai dengan koridornya agar pengelolaan bank sampah dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Proses

pengelolaan bank sampah, begitu serius diperhatikan oleh pihak pemerintah, salah satunya melalui peraturan-peraturan.

1.3.3. Pelaksanaan Bank Sampah

Proses pelaksanaan bank sampah dalam pengelolaannya akan melibatkan masyarakat. Selain upaya dalam pengentasan permasalahan sosial, lingkungan dan ekonomi, masyarakat juga akan teredukasi dengan adanya bank sampah. Masyarakat akan lebih sadar dengan lingkungan sosial karena interaksi dan lebih menghargai lingkungan sekitar. Pengelolaan bank sampah yang baik, akan mengacu pada tata kelola pelaksanaan bank sampah.

Selain mekanisme pengelolaan bank sampah yang sebelumnya telah diulas, bank sampah memiliki standar dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang pelaksanaan bank sampah sebagai berikut:

1. Penetapan jam kerja;
2. Penarikan tabungan;
3. Peminjaman uang;
4. Buku tabungan;
5. Jasa penjemputan sampah;
6. Jenis tabungan;
7. Jenis sampah;
8. Penetapan harga;
9. Kondisi sampah;
10. Berat minimum;

11. Wadah sampah;
12. Sistem bagi hasil; dan
13. Pemberian upah karyawan.

Penetapan pelaksanaan bank sampah, dilaksanakan secara terorganisir dan terintegrasi. Pemuda sebagai pelaksana bank sampah melalui organisasi Karang Taruna dapat melaksanakan proses pengelolaan bank sampah dengan kerjasama dari berbagai pihak. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan agar pengelolaan bank sampah dapat terlaksana dengan baik.

Upaya dalam pengentasan permasalahan sosial khususnya dibidang ekonomi, dapat dilakukan melalui pengelolaan bank sampah. Selain permasalahan ekonomi, permasalahan lingkungan sosial pun akan turut teratasi. Pelaksanaan pengelolaan bank sampah, sudah semestinya dilaksanakan secara profesional dan merujuk pada mekanisme serta tata kelola pelaksanaan dari bank sampah tersebut agar hasil yang dicapai nantinya akan lebih maksimal.